

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Iran pada tahun 2023 bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi tekanan dan pertimbangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pemutusan hubungan diplomatik pada Januari 2016 menandai puncak dari sikap konfrontatif Arab Saudi terhadap Iran, Namun serangkaian peristiwa dan kondisi yang terjadi antara tahun 2019 hingga 2023 secara bertahap mengubah cara pandang para pengambil kebijakan Arab Saudi terhadap manfaat dan risiko dari mempertahankan sikap keras tersebut, sehingga pada akhirnya mendorong Riyadh untuk memilih jalur diplomatik dan kooperatif melalui kesepakatan yang dimediasi oleh Tiongkok di Beijing.

Faktor pendorong perubahan ini dapat dipahami melalui dua sisi yang saling melengkapi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, perubahan pandangan pribadi Putra Mahkota Mohammed bin Salman menjadi faktor yang paling menentukan, mengingat kebijakan luar negeri Arab Saudi sangat tersentralisasi di tangannya. Selain itu, kebutuhan untuk mewujudkan agenda Visi 2030 turut menciptakan tekanan domestik yang kuat, karena keberhasilan program diversifikasi ekonomi tersebut sangat bergantung pada stabilitas kawasan yang dapat menarik investasi asing dan kepercayaan dunia internasional. Berkurangnya

pengaruh kalangan ulama Wahhabi sebagai kelompok yang secara historis menentang kedekatan dengan Iran juga turut membuka ruang politik bagi normalisasi ini untuk terjadi tanpa penolakan besar dari dalam negeri. Sementara itu, dari sisi eksternal, sejumlah guncangan penting seperti serangan terhadap fasilitas minyak Abqaiq dan Khurais pada 2019, kebuntuan perang di Yaman yang tidak kunjung membawa kemenangan, serta perubahan sikap Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden yang tidak lagi memberikan dukungan tanpa syarat, semuanya menunjukkan kepada Arab Saudi bahwa sikap konfrontatif yang selama ini dijalankan justru menimbulkan kerentanan, bukan keamanan. Munculnya Tiongkok sebagai mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak kemudian menjadi faktor yang melengkapi dan memungkinkan proses normalisasi ini benar-benar terwujud dalam bentuk kesepakatan konkret.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa normalisasi hubungan diplomatik ini belum sepenuhnya menyelesaikan akar persoalan yang selama puluhan tahun menjadi sumber persaingan antara Arab Saudi dan Iran, seperti perbedaan ideologis antara Sunni dan Syiah, perebutan pengaruh di berbagai kawasan konflik, maupun perbedaan visi mengenai tatanan regional Timur Tengah. Perjanjian Beijing lebih tepat dipahami sebagai upaya pengelolaan risiko dan pembentukan saluran komunikasi yang lebih baik antara kedua negara, bukan sebagai penyelesaian menyeluruh atas rivalitas struktural yang ada. Oleh karena itu, keberlanjutan hubungan baik ini ke depannya masih akan sangat bergantung pada bagaimana kedua negara menyikapi berbagai dinamika regional yang terus berkembang, termasuk konflik di Yaman, Suriah, maupun ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah pasca peristiwa Oktober 2023.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kombinasi antara kepemimpinan yang tersentralisasi, kebutuhan ekonomi domestik, dan tekanan dari lingkungan internasional dapat bersama-sama mendorong perubahan besar dalam kebijakan luar negeri suatu negara, sekalipun negara tersebut memiliki sejarah rivalitas yang panjang dan mendalam dengan pihak lawannya. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keterlibatan aktor non-tradisional seperti Tiongkok semakin memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik di kawasan yang sebelumnya didominasi oleh pengaruh negara-negara Barat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian yang lebih mendalam dilakukan terhadap keberlanjutan hubungan Arab Saudi dan Iran pasca 2023, khususnya dalam menghadapi dinamika baru di kawasan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai apakah normalisasi ini akan bertahan sebagai perubahan kebijakan jangka panjang atau hanya bersifat akomodasi taktis yang sewaktu-waktu dapat kembali berubah.

5.2 Saran

Dalam menganalisis penelitian menggunakan konsep *foreign policy change* dari Charles F. Herman ini, peneliti memiliki kendala dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat dan dianalisis. Dari tingkat individu, kelompok, dan juga level sistem, sehingga peneliti menyarankan untuk menggunakan konsep alternatif dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri, misalnya dapat dilihat dari aspek aktor domestiknya saja atau eksternalnya saja. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sesuatu yang bersifat dinamis sehingga mengalami perubahan sepanjang waktu baik itu masa kepemimpinan ataupun terjadinya

permasalahan yang mengharuskan perumusan kebijakan baru yang berbeda. Sehingga peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan mengaplikasikan konsep dan teori yang lebih luas lagi.

